



APBD-P 2023, DPRD KALTIM SAMPAIKAN EMPAT CATATAN KEPADA PEMPROV KALTIM

BACA HALAMAN 29



Koran DIGITAL



Lebih Dekat dengan Satu Klik

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023



TERVERIFIKASI DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033



AMBO: RISKA BUKAN HANYA BINATANG, TAPI ANAK SAYA!

BACA HALAMAN 2-5



Kontroversi Relokasi Buaya di Guntung

Ambo: Riska Bukan Hanya Binatang, Tapi Anak Saya!

BONTANG - Rencana Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim untuk merelokasi tiga buaya dari Sungai Guntung, termasuk salah satunya yang akrab dengan nama

Buaya Riska, menarik perhatian publik. Ambo, yang telah merawat Riska selama bertahun-tahun, mengungkapkan perasaannya terkait rencana ini melalui akun Instagram

pribadinya @amboriska.

"Bagaimana mungkin Riska akan dievakuasi juga, selama 26 tahun lamanya saya rawat dengan sepenuh hati," ungkapnya.



“Bagi saya, dia bukanlah binatang, bagi saya, Riska saya anggap anak saya. Riska tidak pernah menyerang manusia, termasuk saya (Ambo). Mungkin saya orang pertama yang diserang, tapi nyatanya tidak pernah Riska melukai segores pun. Bahkan, Riska sering mengusir atau mengejar buaya-buaya liar lain yang masuk pemukiman,” sambungnya.

Ambo juga mengatakan bahwa Buaya Riska justru aktif menjaga pemukiman dari ancaman buaya liar

lainnya dan ikut mempromosikan kota Bontang.

Sebelumnya, BKSDA Kaltim telah menangkap satu buaya sepanjang tiga meter dari Sungai Guntung, Kota Bontang, sebagai langkah awal dalam rencana pemindahan buaya-buaya ini.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Tenggarong BKSDA Kaltim, Suriawati Halim, menjelaskan bahwa rencana ini sudah direncanakan sebelumnya karena adanya laporan

tentang beberapa buaya besar yang sering masuk ke pemukiman di sekitar sungai.

“Ya termasuk juga Buaya Riska, yang terkenal dalam channel YouTube milik Ambo, sering masuk ke pemukiman,” ungkap Suriawati.

Tim BKSDA akan datang ke Bontang pekan depan setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari untuk memastikan keberadaan tiga buaya yang menjadi target relokasi. (MK)



Rencana Relokasi Buaya Riska, Bakhtiar Wakkang Soroti UU Konservasi SDA

BONTANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Bakhtiar Wakkang, memberikan saran terkait rencana relokasi Buaya Riska.

Politisi Partai Nasdem ini menyoroti aspek hukum terkait pemeliharaan buaya yang telah lama dirawat oleh Ambo, warga Guntung.

Bakhtiar Wakkang mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati memberikan celah bagi masyarakat untuk memelihara buaya.

“Hal ini dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penangkaran, dengan penekanan bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) akan melakukan pemantauan rutin terhadap perjalanan penangkaran tersebut. Lembaga konservasi atau penangkaran yang telah mendapat izin memiliki hubungan kemitraan dengan BKSDA,” bebernya.

Bakhtiar Wakkang juga mengungkapkan bahwa BKSDA memiliki kewenangan untuk menitipkan buaya hasil tangkapan atau penyerahan warga kepada lembaga konservasi

atau penangkaran perorangan untuk perawatan lebih lanjut.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa persoalan yang melibatkan Pak Ambo dapat difasilitasi dengan menghubungi BKSDA untuk melakukan asesmen dan pemeliharaan lebih lanjut terhadap buaya tersebut, dengan memastikan bahwa buaya tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990. (MK)

Penulis/Editor: Agus Susanto



Hashtag #buayariskabontang Dominasi Media Sosial: Warga Tolak Relokasi Riska

BONTANG – Kontroversi mengenai wacana Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim merelokasi buaya yang dikenal dengan nama Riska mendapat respons besar dari netizen.

Berbagai unggahan dengan hashtag #buayariskabontang, #LOVERISKA, dan #DONTRELOCATERISKA membanjiri media sosial.

Sejumlah komentar datang dari akun-akun ternama. "Kenapa harus di relokasi?" tanya @muhrishar_s.h, yang menduga adanya kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang ingin merelokasi Riska. Ia juga menyinggung bahwa Riska selama ini sudah dirawat dengan baik oleh 'Pak Ambo' dan menjadi daya tarik pariwisata.

Komentar lainnya datang dari @yasarahray_ yang dengan tegas menolak relokasi dengan hastag #LOVERISKA #DONTRELOCATERISKA. Bahkan ia juga mengkritik pemerintah dengan menyebutnya harus lebih fokus pada pembenahan lingkungan daripada mengurus Riska.

"Jangan relokasikan riska mohon untuk dipertimbangkan terlebih dahulu," kata @haikalilham_0704.

Sejumlah netizen juga menyuarakan kekhawatiran atas kesejahteraan Riska jika proses relokasi terjadi. Mereka khawatir Riska akan stres, tidak bisa beradaptasi, atau bahkan bisa mengancam nyawa Riska sendiri. Seperti yang dikatakan oleh @yahyahamdani.7, "saya yakin buaya riska akan stres malah bisa melukai manusia."

Netizen lain seperti @indramaulana1509, @andiwiraabe, dan @ibnuazhar1802 menekankan bahwa Riska telah menetap di habitat aslinya dan tidak ada konten yang menunjukkan buaya tersebut meresahkan masyarakat sekitar.

Tak sedikit netizen yang juga meminta bantuan dari figur publik seperti @panjipetualang_real dan @irfanhakim75 untuk membantu menyuarakan penolakan relokasi Riska, seperti komentar dari @aditya_halimun dan @kun_agant. (MK)

Penulis/Editor: Agus Susanto



Ambo



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



KUNJUNGAN LAPANGAN: Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si meninjau pembangunan Gedung Diklat yang dibangun di KBM Tanjung Selor, Selasa (12/9) lalu.

Pembangunan Gedung Diklat Kaltara Capai 40 Persen

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP., M.Si., meninjau pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (12/9).

Pada kesempatan tersebut, Wagub Yansen TP memberikan apresiasi atas progress pembangunan yang telah mencapai 45 persen. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi konstruksi

yang ramah gempa dalam pembangunan asrama ini.

"Asrama Diklat ini akan menjadi tempat pelatihan dan pendidikan bagi para ASN di Kaltara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan teknologi yang ramah gempa agar bangunan ini lebih aman dan tahan terhadap bencana," ucap Wagub Kaltara Yansen TP.

Wagub Yansen menambahkan bahwa pembangunan Asrama Diklat Pemprov Kaltara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah provinsi Kaltara.

"Asrama Diklat Kaltara memiliki luas bangunan sekitar 432 meter persegi dengan kapasitas sekitar 200 orang. Nantinya asrama ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk ruang belajar di lantai I, ruang pertemuan, dan asrama yang terletak di lantai II. Pembangunan asrama ini didanai menggunakan dana APBD Kaltara tahun anggaran 2023," terang Wagub Yansen. **(dkisp)**

Lagi, Pemprov Diganjar Penghargaan oleh BKN

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mendapatkan peringkat ke III atas apresiasi Percepatan Layanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pensiun di Wilayah Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apresiasi ini diberikan langsung Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Drs. Aris Windiyanto, M.Si pada Rakor BKN yang digelar di Balikpapan, Selasa (12/9).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa mengungkapkan apresiasi tersebut diberikan atas komitmen Pemprov Kaltara pada manajemen kepegawaian.

"Alhamdulillah, kita mendapatkan peringkat ke 3. Ini menjadi komitmen kita dalam memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan tepat,"katanya.

Ia berharap adanya apresiasi ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan layanan kepegawaian. "Kita berharap tiap tahunnya layanan kepegawaian semakin baik. Apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi kita,"jelasnya.



Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah mendapatkan tiga penghargaan atas kinerja instansi pengelola manajemen aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah Kerja Kantor Regional VIII.

Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, A. Darmuji kepada Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang serta disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Tanjung Selor pada Juni lalu. (dkisp)

Minta Penyelesaian Kantor Baru Sesuai Target

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum meninjau kegiatan progress pembangunan gedung baru Sekretariat Provinsi (Setprov) yang berlokasi di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang meminta agar pihak kontraktor menyelesaikan pembangunan gedung baru Setprov Kaltara sesuai dengan target yang telah ditentukan.

"Kita berharap kendala lainnya dapat diatasi oleh pihak kontraktor sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaian," tegas Zainal Paliwang di lokasi proyek, Senin (11/9/2023).

Diketahui bahwa pengerjaan Gedung Sekretariat Pemprov Kaltara saat ini merupakan pengerjaan tahap ke-9, dan dipastikan akan selesai pada tahun depan.

"Kita memiliki target untuk menyelesaikan proyek ini tahun depan. Untuk lantai 3 dan 4, prioritasnya adalah bulan Oktober nanti, terutama untuk ruangan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Provinsi Kaltara. Pekerjaan sudah mencapai 70 persen, yang tinggal dilakukan adalah tahap finishing," terangnya,



SEGERA DIRAMPUNGKAN: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meninjau pengerjaan gedung baru Setprov Kaltara belum lama ini.

sambil didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi mengakui terus mendorong penyedia untuk mem-

percepat pekerjaannya. "Ini terus berjalan, kita berharap lantai 3 dan 4 bisa segera operasional,"terangnya.

Untuk pekerjaan yang sedang berproses di lantai 4 adalah pengerjaan interior dengan target selesai di awal bulan Oktober. (dkisp)



SOSIALISASI: Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si membuka Sosialisasi SIMADU MORASA di Hotel Luminor Tanjung Selor.

Pemprov Sosialisasikan SIMADU MORASA

TANJUNGSALOR – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Bustan SE.,M.Si. membuka Sosialisasi Sistem Data Terpadu Monitoring Pengadaan Barang / Jasa (SIMADU MORASA) dan Workshop Penyusunan Dokumen Pemilihan bagi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Kegiatan workshop juga dihadiri langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Amir Hamsyah dan perwakilan seluruh perangkat daerah Kaltara.

“Kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa hari ini dan itu harus

disikapi. Dan kita semua dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan sesuai dengan target dan kebutuhan baik kebutuhan perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan.

Pengadaan barang dan jasa tentu saja akan menimbulkan potensi permasalahan apabila tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Sehingga harus disikapi oleh semua tingkatan pengetahuan keterampilan.

Ia mengatakan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam segala bidang menjadi kebutuhan. Sehingga pros-

es pengadaan harus sesuai dengan target dan kebutuhan dari perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

“Salah satu tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltara yaitu memberikan pembinaan dan advokasi kepada pelaku pengadaan,” jelasnya.

Karena itu ia berharap kepada peserta untuk mampu mengikuti kegiatan sesuai dengan penugasan dari instansi masing-masing.

“Kita harapkan dapat meningkatkan profesionalisme yang diberikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” tutupnya. **(dkisp)**



YAHYA/MEDIA KALTIM

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah membuka dan memberikan arahan kepada guru-guru PAUD.

Bimtek PAUD HI, Wawali Bontang Harapkan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak-anak PAUD

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang membuka kegiatan Bimtek PAUD HI (Holistik Integratif) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang pada, Rabu (13/9/2023) di Aula Kecamatan Bontang Barat.

Bimtek PAUD HI ini ditujukan pada guru-guru PAUD se-Kota Bontang dan tergabung dalam komunitas PAUD.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan Bimtek PAUD HI dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak PAUD sebagai generasi bangsa.

Najirah menambahkan setiap anak-anak di Kota Bontang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tenaga pendidik yang berkualitas melalui kegiatan Bimtek PAUD HI.

“Dengan kegiatan ini kita berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak di Bontang dengan

berkualitas dan didukung pendidik yang berkualitas dan berkomitmen tinggi,” kata Najirah saat membuka Bimtek, Rabu (13/9/2023).

Najirah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam memberikan dan mendukung untuk kolaborasi memberikan ruang yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

“Saya mengajak semua masyarakat dan lembaga pendidikan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang

anak,” jelas Najirah.

Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan untuk lebih mengetahui secara mendalam dan peningkatan PAUD HI maka diadakan Bimtek PAUD untuk satuan PAUD terpilih di Kota Bontang. “Untuk mengetahui secara mendalam mengenai PAUD HI maka diadakan Bimtek. Untuk peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dari PAUD,” kata Bambang. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari





YUSVA ALAM

Sidak Komisi I DPRD Bontang ke proyek pembangunan Kantor Lurah Satimpo, Rabu (13/9/2023).

Proyek Pembangunan Kantor Lurah Satimpo Belum Capai Target

BONTANG – Sidak kembali digelar Komisi I DPRD Bontang terkait progres pembangunan Kantor Kelurahan Satimpo di Lapangan HOP 1, Kecamatan Bontang Selatan, Rabu (13/9/2023).

Hasil sidak tersebut, progres pembangunan kantor baru mencapai 48 persen dari target yang seharusnya dicapai September ini yakni 50 persen. Proyek ini sudah dikerjakan selama 4 bulan dan ditarget harus selesai pada 30 November 2023.

“Masih minus dari target, semoga bisa selesai tepat waktu,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking.

Tak hanya itu, dari hasil Sidak tersebut ditemukan 12 pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, serta tidak memi-

liki BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Raking, APD merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi demi keselamatan para pekerja.

“Harusnya keselamatan tenaga kerja diperhatikan. Masa tidak pakai pengaman, cuma pakai sandal saja. Khawatirnya membahayakan keselamatan pekerja, apalagi tidak ada BPJS nya. Kami bisa setop pekerjaan kalau begini kondisinya,” tegasnya.

Sementara itu, Site Manager Kontraktor Pelaksana CV Nuraini, Laode Winardi beralasan, terlambatnya pengerjaan ini dikarenakan ada perubahan tempat pembangunan awal, sehingga harus merubah semua desain bangunan.

“Karena gambar awal pembangunannya di depan, ternyata pindah di belakang. Kami harus ubah semua

desainnya dari awal, karena tempat awal dan yang sekarang ini beda strukturnya,” untkannya.

Selain itu, keterlambatan material dan minimnya tenaga kerja pembantu (helper) serta juga main power menjadi salah satu penyebab pengerjaan proyek tersebut masih minus dari target.

“Tenaga kerja kami ada 20, itu sudah termasuk tukang dan helper. Kami belum bisa tambah karena menyesuaikan anggarannya. Kendalanya di situ,” terangnya.

Masalah APD dan BPJS Ketenagakerjaan, pihak akan segera melengkapi kekurangan itu. “Segara kami usulkan ke atasan. Kami usahakan Minggu depan akan terpenuhi semua,” tandasnya. (al/adv)



Paripurna DPRD Balikpapan Terkait Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas 5 Rancangan Peraturan Daerah.

Gelar Paripurna, DPRD dan Pemkot Bahas 5 Raperda

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang III Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Rabu (13/9/2023).

Adapun agendanya yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD tahun anggaran 2024.

Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023. Ketiga, pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi.

Keempat, sistem kesehatan daerah. Dan kelima, perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdullah mengatakan, dalam rapat paripurna ini ada sejumlah agenda yang

dilaksanakan. Di antaranya nota penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD 2024 dan nota penjelasan Wali Kota atas APBD Perubahan 2023.

"Jadi dalam beberapa pekan ke depan, DPRD bersama Pemkot Balikpapan akan maraton membahas dua Raperda APBD ini," ujarnya.

Lanjut Abdullah, setelah pandangan umum kemudian agendanya adalah jawaban Wali Kota terkait pandangan umum fraksi-fraksi dan kemudian disambung dengan pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan bersama.

"Kami akan lanjutkan, mudah-mudahan tanggal 20 sudah ada pendapat akhir fraksi yang dilanjutkan dengan penandatanganan bersama kesepakatan dari RAPBD menjadi APBD-P 2023 mendatang," jelasnya.

Abdullah menyebutkan untuk APBD murni tahun 2023 tidak boleh ada Silpa anggaran, sehingga harus

zero. "Jadi semaksimal mungkin harus zero. Karena APBD Perubahan 2023 melanjutkan APBD Murni 2023," tambahnya.

Legislatif dan eksekutif telah resmi menyepakati kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas platform anggaran sementara (KUPA PPAS) Perubahan 2023.

"Kami sepakat rencana APBD setelah perubahan sebesar Rp 4,1 triliun. Nominal ini meningkat tapi ini masih prognosis yang menggunakan dasar aturan juga," ujar Abdullah lagi.

Termasuk mempertimbangkan acuan lalu, seperti dana bagi hasil (DBH) pusat, DBH provinsi, dan pendapatan lainnya yang belum masuk dalam perhitungan. (adv)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'/MEDIA KALTIM

Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Bapemperda Optimis Tuntaskan 25 Raperda Prioritas Sebelum Akhir Tahun

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sedang berfokus menyelesaikan target peraturan daerah, yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Sebanyak 25 raperda, optimis akan selesai tepat waktu. Termasuk raperda-raperda di luar Propemperda 2023, seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Yani menjelaskan, kini sudah 75 raperda yang sudah selesai dan sedang tahapan pembahasan di DPRD Kukar. Sementara 25 persen raperda

lainnya, akan segera dibahas.

"Kalau yang lain sudah berproses dan itu sudah ditangani pansus dan tinggal difasilitasi dengan provinsi, setelah itu disahkan," ungkap Yani pada mediakaltim.com, Rabu (13/9/2023).

Disebutkan, ada sebanyak 4 raperda yang dianggap perlu untuk segera dibahas bersama di DPRD Kukar. Namun ujar Yani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar belum kunjung menyampaikannya. Di antaranya terkait pajak, retribusi daerah, hingga raperda terkait Badan usaha Milik Daerah (BUMD).

Begitupun dengan raperda-raper-

da yang di luar Propemperda 2023, akan tuntaskan. Selain bersifat wajib, pengesahannya pun hanya tinggal menunggu jadwal dari DPRD Kukar untuk disidangkan secara paripurna. Seperti Perda APBD tahun 2024, Perda APBD Perubahan Kukar 2023, Perda Pertanggungjawaban APBD 2022.

"Maksudnya itu di luar Propemperda, jadi ada 25 raperda yang memang harus kita selesaikan di tahun ini," tutup politisi PDI Perjuangan itu. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Upaya Selamatkan Aset Daerah, DPRD Kukar Dorong Pembahasan Dua Raperda

TENGGARONG - Sebanyak 25 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023 akan dituntaskan DPRD Kukar, hingga akhir tahun. Namun ada beberapa raperda yang dianggap paling penting untuk segera dibahas dan disahkan menjadi perda.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut setidaknya ada dua raperda yang langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dimana menyangkut kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih lanjut, perlu ada aturan-aturan yang menaungi aset-aset milik daerah yang berada disana, sehingga ketika masuk dalam wilayah IKN, tidak begitu saja diserahteruskan ke Badan Otorita IKN.

Ia mencontohkan terkait BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), yang diketahui mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dari aktivitas migas. Ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tidak merevisi perda yang sudah mengatur, maka potensi kehilangan 10 persen yang sudah dinikmati sebagai sumber pendapatan bisa saja hilang dan lepas begitu saja.

"Oleh karena itu, ini menjadi fokus kita terkait dengan revisi perda MGRM," ungkap Ahmad Yani.

Selain itu, terkait perubahan perda penyertaan modal ke BUMD PT Tunggang Parangan (Perseroda). Dalam rangka memasukan aset daerah yang dimiliki oleh Pemkab Kukar dan memiliki nilai tinggi. Seperti Pelabuhan Amborawang yang terletak di Kecamatan Samboja, yang menjadi bagian dari wilayah IKN nantinya. Diperkirakan senilai Rp 400 miliar, untuk bisa dikelola oleh PT Tunggang Parangan.

Karena dijelaskan oleh Yani, jika memang tidak segera dikelola oleh BUMD dan tetap atas nama Pemkab Kukar, maka kemungkinan besar akan dieksekusi dan diambil oleh Badan Otorita IKN. "Sehingga, harapan besar DPRD melalui Bapemperda bagaimana revisi perda penyertaan modal ini kemudian mengisi aset Pelabuhan (Amborawang) Samboja itu bisa dikelola oleh BUMD," lanjut Yani.

Karena dianggap lebih menguntungkan Pemkab Kukar, jika dikelola oleh BUMD. Akan ada nilai kerjasama yang bisa menjadi Pemasukan Asli Daerah (PAD) bagi Kukar, meski berada di wilayah IKN. "Sehingga, ini adalah sangat penting dan mendesak. Kemudian kita juga akan membahas bersama bupati seperti apa tanggapannya, minimal aset ini selamat Rp 400 miliar," timpalnya.

Tak hanya keberadaan Pelabuhan Amborawang Samboja saja, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti (RSUD ABADI), pun memiliki kesempatan serupa. Diupayakan bisa turut dikelola oleh BUMD, tetap menjadi Pemkab Kukar. Walaupun masuk wilayah IKN, Pemkab Kukar tetap bisa mendapatkan pundi-pundi PAD.

"Saya rasa dua perda itu yang sangat fokus kita bahas yang mendesak dan sangat penting," tutup Yani. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim



BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session Fokus Pengembangan Kompetensi dan Karir ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-41 yang bertema "Manajemen Talenta Sebagai Strategi Pengembangan Kompetensi dan Karir ASN" pada Rabu, 13 September 2023, pukul 10:00 WITA.

Acara Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube BPSDM Kaltim.

Acara tersebut menghadirkan narasumber seorang Analis Sumber Daya Manusia Ahli Madya, BKD Provinsi Jawa Barat, Dr. Rita Kardinajari, Msi.

Tampil sebagai moderator adalah Imran, Msi, Widyaswara Ahli Madya BPSDM Kaltim. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, M.AP, mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir, baik itu yang ada di Kaltim maupun di luar Kaltim.

"Ikan selar ikan selangit, hari Selasa main selancar, teruslah belajar dan terus semangat, semoga acara ini berjalan lancar, Amien ya Robal Allamin," ucapnya dengan pantun seraya membuka acara.

Peserta Zoom yang hadir pada gelaran tersebut terpantau sebanyak 294 peserta, bukan hanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kaltim tapi juga diikuti oleh ASN di luar Kaltim.

Narasumber acara, Rita, mengaku sangat senang bertemu dengan rekan-rekan ASN Kaltim dan ASN dari



Rangkaian Sharing Session BPSDM dari aplikasi ZOOM. (Kiri) Moderator Imran Msi, (Kanan) Narasumber Dr Rita Kardinajari Msi (bawah) Kepala BPSDM Dra Nina Dewi M.AP

luar Kaltim yang mengikuti Sharing Session melalui Zoom tersebut.

Rita juga mengatakan bahwa ASN kedepannya tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga dituntut untuk produktif dari outputnya dan memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik.

"Kita sebagai ASN harus mengerti mengapa kita direkrut, kenapa kita bekerja sebagai ASN, tentunya kemajuan masyarakat ada ditangan kita, atau dalam sejarah kerajaan Kutai itu Panglima Awang Long adalah punggawa kerajaan, disini yang menjadi punggawanya adalah ASN," ujar Rita.

Rita juga berharap kepada seluruh

peserta agar bersyukur dengan pekerjaan yang ada karena banyak masyarakat di luar sana yang ingin menjadi ASN.

"Oleh karena itu, mari kita nikmati pekerjaan ini dengan cara berkarya," pungkasnya.

Diketahui, acara ini digelar secara umum dan masyarakat juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube BPSDM Kaltim. Hingga berita ini diterbitkan, video kegiatan ini sudah ditonton sebanyak 580 kali. (ADV)

Pewartu: Hanafi

Editor: Agus Susanto



ISTIMEWA

Heri Hendrayana Harris atau yang lebih akrab di panggil Gol A Gong.

Gol A Gong Kembali Semarakkan Tour Library Kaltim 2023

SAMARINDA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), November 2023 ini, rencananya akan kembali menggelar Library Tour Kaltim. Dalam kesempatan ini juga akan menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman luas dalam dunia literasi. Salah satu narasumber yang diundang adalah Heri Hendrayana Harris, atau yang lebih dikenal dengan nama Gol A Gong.

Ketua Panitia Tour Library Kaltim, Nikko Dwi Nanda Armanjaya S.H Gol, mengatakan Gol A Gong, adalah seorang disabilitas yang diangkat sebagai duta baca Indonesia sekaligus sastrawan yang telah menginspirasi banyak generasi muda. Ia sudah

menerbitkan banyak karya sastra, di antaranya "Aku Pantang Menyerah", "Labirin Lazuardi" dan "Balada Si Roy".

"Pada Tour Library kali ini, kita tetap mengundang Gol A Gong, dia seorang Duta baca Indonesia. Tahun kemarin acara Tour Library Kaltim sukses, kali ini mangkanya kita panggil kembali," ungkap Nikko

Gol A Gong rencananya akan ikut Tour Library Kaltim di empat kabupaten/Kota diantaranya Samarinda, Bontang, Kutai Timur dan Berau. Sebagai narasumber, Gol A Gong akan memberikan inspirasi kepada para pengunjung Tour Library.

"Beliau akan kita bawa keliling Tour Library ini, dan beliau akan menjadi

beberapa narasumber dalam kegiatan ini," katanya.

Dalam tahun ini, Nikko belum menginformasikan secara terperinci acara apa saja yang akan dihadiri Gol A Gong. Akan tetapi Tour Library Kaltim tahun lalu, Gol A Gong menjadi beberapa Narasumber workshop Pembuatan Novel, Workshop BIG BOOK, Seminar Literasi, Coaching Clinic, Motivasi Literasi, Pagelaran Dongeng, Literasi Budaya Lokal, Workshop Menulis Cerita Perjalanan, baik itu yang digelar DPKD Kaltim juga DPKD Kabupaten/Kota disinggahi. (adv)

Pewartu : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPKD Kaltim, Nikko Dwi Nanda Armanjaya S.H.

Tour Library Kaltim 2023, Sambangi Samarinda, Bontang, Kutim, dan Berau

SAMARINDA - Kabar baik bagi pelajar, mahasiswa, dan pecinta buku di Samarinda, Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim) akan kembali menggelar Tour Library Kaltim di empat kabupaten/kota tersebut pada November 2023.

"Seperti tahun lalu, tahun ini kita akan kembali menyelenggarakan Tour Library Kaltim, dan rencananya akan digelar pada pertengahan November," ungkap Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPKD Kaltim, Nikko Dwi Nanda Armanjaya S.H., kepada mediakaltim.com beberapa hari lalu.

Ada nuansa berbeda pada Tour Library Kaltim tahun ini. Jika pada

2022, tour dilakukan ke kabupaten/kota di arah selatan Kaltim, tahun ini tour akan menuju arah utara Kaltim.

"Tahun lalu kita menuju arah selatan, tahun ini kita akan ke arah utara, dimulai dari Samarinda, kemudian Bontang, berlanjut ke Kutai Timur, dan berakhir di Berau," jelas Nikko, yang juga menjabat sebagai ketua panitia Tour Library Kaltim.

Tujuan dari Tour Library ini adalah untuk mempromosikan keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Nikko berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menjadi wilayah kunjungan Tour Library Kaltim.

"Kami berharap mendapat dukungan dari DPKD Kabupaten/Kota yang akan kami kunjungi, serta stakehold-

er lainnya seperti Dinas Pendidikan, agar kegiatan ini berjalan lancar," katanya.

Diketahui, Tour Library Kaltim merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh DPKD Kaltim setiap tahun, bekerja sama dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Kaltim dan anggota DPRD Kaltim.

Dalam kegiatan Tour Library Kaltim, akan ada berbagai aktivitas seperti membaca buku bersama, mendongeng, belajar menulis, diskusi literasi bagi remaja bersama penulis muda, serta workshop dengan narasumber penulis novel dan duta baca Indonesia, Gol A Gong. (ADV)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus Susanto



ISTIMEWA

Barcode perpustakaan digital.

RSUD Taman Husada Bontang Tambahkan Perpustakaan Digital untuk Pengunjung

BONTANG - RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan fasilitas terbaru kepada para pengunjung yang sedang mengantre atau menunggu untuk berobat berupa perpustakaan digital.

Perpustakaan tersebut berupa barcode yang diletakkan tidak jauh dari pintu masuk. Bisa diakses menggunakan scan barcode yang ada di smartphone.

"Per tanggal 13 September 2023 pengunjung RSUD dapat menikmati anjungan Buncu Baca Etam yang merupakan proyek hibah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim," jelas dr. Siti Aisyatur Ridha dari Tim Humas RSUD Taman Husada Bontang saat dihubungi redaksi.

Bila dilihat artinya Buncu Baca Etam yang diambil dari bahasa kutai yaitu Pojok Baca Kita, namun prinsipnya secara digital. Seperti hal-

nya E-perpusnas, pengguna dapat memilih berbagai jenis buku yang ada sekitar 600 lebih buku.

"Jadi dalam perpustakaan digital ini menyediakan berbagai macam buku, dan buku-buku tersebut bisa untuk semua umur," jelasnya.

Tentu karena telah memasuki zaman yang sudah serba canggih, rumah sakit pun harus ikut berkembang. Tidak hanya dari segi teknologi pengobatan, tapi juga fasilitas penunjang lain, seperti perpustakaan digital tersebut.

"Anak-anak juga rata-rata sudah bisa pegang gadget, dan jarang membaca, bahkan memegang buku. Begitu juga orang dewasa, jadi kita berikan akses ini untuk mereka," tutupnya.

Pengguna anjungan ini, baik pengunjung maupun karyawan RSUD patut bersyukur mengingat di Bontang

hanya 3 instansi yg terpilih untuk pemanfaatan anjungan Buncu Baca Etam ini.

Pengguna dapat menggunakan fasilitas baca gratis E-buku dengan cara melakukan scan QR dan berada di area 200 meter dari lokasi titik anjungan, lalu pengguna tersebut dapat bebas memilih buku baik itu buku cerita anak, pengetahuan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Semoga dengan ada layanan baca gratis ini akan meningkatkan minat baca dan semangat literasi dari pengunjung RSUD Taman Husada selain memanfaatkan waktu luang saat menunggu panggilan dokter maupun panggilan apotek ataupun disaat menunggu keluarga yang sakit.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Ada 8 Nama Ikut Seleksi Sekda Berau, Madri: yang Terpilih Harus Netral

TANJUNG REDEB - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau saat ini diisi Pelaksana Tugas (Plt), yakni Sujadi yang juga sebagai Staf Ahil Bidang Pembangunan dan Ekonomi.

Diketahui, hingga kini seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut masih berlangsung, ada 8 nama peserta yang tercatat.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan ke Bupati untuk memilih Sekda baru yang tepat dan tidak tergiring ke dunia politik. "Harus netral dan dilihat dulu latar belakangnya selama bekerja sebagai ASN," ungkapnya kepada sejumlah awak media, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya, Bupati selaku kepala daerah harus menetapkan Sekda baru yang mampu menjadi cadangan, bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat serta yang paling penting dapat memberikan solusi.

"Jangan berpikir setelah menduduki jabatan Sekda ada keinginan untuk terjun ke dunia politik. Selesaikan

dulu jabatannya, baru berpikir untuk ke dunia politik," tegasnya.

Menurutnya, jabatan sebagai Sekda Berau merupakan amanah yang besar dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan.

Selain itu juga merupakan ujung tombak kepala daerah, baik dalam mengontrol pegawainya ataupun program-program kerja.

"Sehingganya, diharapkan program-program itu nantinya bisa tercapai minimal 90 persen. Kalau bisa capai 100 persen," katanya.

Lanjutnya, peran Sekda juga dinilai sangat penting untuk memberikan solusi apabila kepala daerah dalam masalah. Bahkan diharapkan dapat menjaga dan menyelamatkan kepala daerah.

"Kalau Sekda tidak jeli, tidak kompeten dan tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah, tentu akan jadi suatu hal. Menurut saya semua peserta cocok, tinggal nanti bagaimana Bupati sebagai kepala daerah yang

menentukan," imbuhnya.

Politikus Nasional Demokrat (Nas-Dem) ini menekankan agar berhati-hati dalam memilih Sekda. Jangan sampai, kata Madri, dilihat berdasarkan ada keluarganya di politik.

"Jika perlu, cari Sekda yang netral dan tidak tergiring ke dunia politik. Karena tanggung jawab menjadi Sekda itu besar," ucapnya.

Dia berharap, Bupati tidak salah memilih Sekda demi menjaga birokrasi pemerintahan di Bumi Batiwakkal. Terlebih, kebijakan Sekda sangat vital, karena keberhasilan suatu kepala daerah berkaitan erat dengan bawahan yang dapat dibawa berkoordinasi.

"Karena kalau salah pilih maka birokrasi pemerintah menjadi tidak bagus. Jadi ya perlu hati-hati," tandasnya. **(mnz/dez)**

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Kanit Sidik Subdit II Ditreskoba Polda Kaltim, Iptu Arif Rahman dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim AKBP I Nyoman Wijana memimpin pemusnahan barang bukti ganja.

Polda Kaltim Musnahkan Ganja dari Kelompok Kemping

BALIKPAPAN - Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Kaltim bersama Kejaksaan Negeri (PN) Balikpapan serta para tersangka dan kuasa hukumnya melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba jenis ganja di Makopolda Kaltim pada Rabu (13/9/2023).

Pemusnahan ini dipimpin oleh Kanit Sidik Subdit II Ditreskoba Polda Kaltim, Iptu Arif Rahman dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim AKBP I Nyoman Wijana dengan menumpahkan barang bukti ganja ke dalam blender yang sudah berisi cairan dicampur bahan prostex dan kemudian dibuang ke dalam toilet.

Kanit Sidik Subdit II Ditreskoba Polda Kaltim, Iptu Arif Rahman

mengatakan, kasus ini diungkap pada awal September 2023 lalu. Di mana para tersangka ini merupakan kelompok anak kemping masing-masing berinisial ZF (40), MS (26), AD (28) dan FI (39).

"Mereka kita tangkap di rumah ZF, usai mengambil barang yang dipesan melalui jasa ekspedisi," ujarnya.

Lebih lanjut Arif Rahman menjelaskan, barang bukti ganjan kering yang didapat dari tangan para tersangka sebanyak 303,73 gram dan sudah terbagi kedalam beberapa paket, termasuk lintingan berupa rokok.

"Ada 6 paket besar serta beberapa paket kecil termasuk mereka sudah ada yang membuat lintingan seperti rokok," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, para tersangka ini sudah 6 bulan

menggunakan ganja. Bahkan untuk ZF sudah dua kali memesan ganja dari Kota Medan.

"Si ZF ini sudah dua kali pesan. Kalau yang bertiga ini sifatnya sumbangan dan pas datang dibagi sesuai uangnya mereka. Cuma lokasi pesannya sama dengan ZF juga dari Medan," tambah Arif Rahman.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) subpasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman kurungan penjaranya sampai 12 tahun.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Petugas Satpol PP Kota Balikpapan saat menyita salah satu Pom Mini di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Balikpapan Tengah.

Satpol PP Tertibkan Pom Mini yang Menjamur di Balikpapan

BALIKPAPAN - Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perdagangan, BPBD, Kecamatan, Kelurahan hingga TNI-Polri menggelar razia dan penertiban terhadap sejumlah Pom Mini yang berada di kawasan Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah pada Rabu (13/9/2023).

Sekretaris Satpol PP Kota Balikpapan, Izmir Novian Hakim mengatakan, kegiatan ini merespon semakin menjamurnya Pom Mini di Kota Balikpapan. Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, di tahun 2019 lalu ada sebanyak kurang lebih 100 Pom Mini. Namun saat ini sudah ada sekitar 600-an lebih Pom Mini di Kota Balikpapan.

"Sebenarnya ini kegiatan rutin saja. Kami melakukan penertiban Pom Mini yang sudah ada dalam Perda kita Nomor 1 Tahun 2001 bahwa di pasal 19 itu dilarang menjual BBM

eceran dan atau SPBU mini seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut Ismir menjelaskan, jika keberadaan Pom Mini yang semakin menjamur ini tidak ditertibkan, maka risiko bahaya kebakaran bisa mengancam warga sekitarnya.

"Kalau tidak kita tertibkan berbahaya, berpotensi kebakaran sebenarnya. Kemudian dari sisi regulasi juga tidak ada kan. Makanya kami pemerintah kota bersama instansi terkait melakukan giat penertiban yang akan berkesinambungan," jelasnya.

Dari penertiban yang dilakukan tim gabungan ini terdapat 10 Pom Mini yang disita petugas. Hal ini karena pemilik Pom Mini tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan Satpol PP.

"Ada 10 yang kita sita, itu di Balikpapan Tengah ada 6 dan Balikpapan Kota ada 4," tambah Ismir.

Ismir mengaku sebelum memberi

tindakan tegas, Satpol PP lebih dulu memberi surat teguran kepada pemilik Pom Mini ini.

"Sebelumnya sudah kita jaring, kita berikan teguran untuk memindahkan dan sampai pada hari ini, batas waktu yang ditentukan mereka belum memindahkan dispenser Pom Mini itu sehingga kita lakukan penyitaan," tegasnya.

Nantinya para pemilik Pom Mini ini akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. "Nanti kita sidang dulu di Pengadilan. Biar Pak Hakim yang memutuskan apakah BB (Barang Bukti) ini akan dikembalikan atau dimusnahkan, nanti biar kita lanjutkan di persidangan," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

SELURUH JAJARAN MEDIA KALTIM GROUP
MENGUCAPKAN

Turut Berduka Kita



Atas Meninggalnya

RAHMAT KARTOLO BIN SAYID RIMBA

Wafat pada tanggal 14 September 2023, pukul 05.30 wita
di RSUD Kanujoso Balikpapan

"Semoga semua amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT
dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, Aamiin"

Hingga Agustus 2023, KUA Bontang Utara Catat Ada 285 Pasang Pernikahan

BONTANG – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang mencatat ada sebanyak 285 pasang pernikahan yang terhitung sejak Januari 2023 hingga Agustus 2023.

Kepala Kantor KUA Kecamatan Bontang Utara, Hartono menjelaskan Kantor KUA Kecamatan Bontang Utara setiap tahunnya bisa

mencatatkan pasangan hingga 500 pasang. "Sampai September ini, di Agustus lalu KUA mencatatkan sebanyak 285 pasang pernikahan," kata Hartono kepada Mediakaltim.com.

Selanjutnya mengatakan pasangan yang tercatat ini tersebar di Kecamatan Bontang Utara. Adapun rincian dari data KUA setiap bulannya yakni Januari tercatat ada sebanyak 41 pasang, Februari

sebanyak 37 pasang, Maret 35 pasang, April 8 pasang, Mei 55 pasang, Juni 26 pasang, Juli 62 pasang dan Agustus 21 pasang. "Puncaknya terbanyak pasangan menikah pada saat bulan Islam Zulhijah lalu," jelas Hartono.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Narasumber pada saat menyampaikan mengenai sekolah ramah anak.

Wujudkan Sekolah Ramah Anak, Kepsek dan Guru Ikuti Pelatihan Fasilitator SRA

BONTANG – Untuk menerapkan sekolah ramah anak, DPPKB terus berupaya memberikan pelatihan fasilitator sekolah ramah anak di Kota Bontang. Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru dan pengawas sekolah. Pelatihan fasilitator SRA sebagai salah satu langkah dalam menerapkan Kta Layak Anak.

Kepala DPPKB Bontang, dr Bahauddin menjelaskan sekolah ramah anak itu dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah untuk anak seperti keadaan nyaman, tidak ada kekerasan, tidak ada 'pembuluan', guru-guru dapat memberikan rasa aman dan perlindungan selama berada di Lingkungan sekolah.

"Kita berikan kesempatan untuk anak-anak mengembangkan dirinya. Kita hanya memberikan anak-anak motivasi dan mengarahkan. Terus menghindari penghukuman dari guru," kata Bahauddin kepada Me-

diakaltim.com, Rabu (13/9/2023).

Bahauddin mengatakan semua sekolah yang ada di Bontang akan diupayakan dalam melaksanakan sekolah ramah anak. Namun untuk data sekah dari Dinas pendidikan dan kebudayaan ada sebanyak 90 sekolah.

"Tentunya sasaran kita sebanyak mungkin sekolah. Tapi hingga sampai saat ini belum ada yang terstandarisasi sekolah ramah anak. Untuk itu kita laksanakan pelatihan fasilitator sekolah ramah anak yang dimulai dari Kepala Sekolah (Kepsek), guru-guru, pengawas dan dari kementerian agama," katanya.

Untuk menuju Kota Layak Anak harus memiliki sekolah yang terstandarisasi sekolah ramah anak. "Apakah nantinya SD, SMP, SMA, tahun depan kita menuju ke sana. Dengan pelatihan fasilitator ini bisa mempercepat pencapaian standarisasi sekolah ramah anak," ungkapnya.

Dalam standarisasi sekolah ramah anak, DPPKB mengusulkan satu sekolah ke pemerintah pusat.

"Setiap daerah mengusulkan satu sekolah per kategori. Karena kuota yang menentukan dari pusat. Kita hanya sebatas mengusulkan. Tahun ini kita mengusulkan satu sekolah, tapi tahun ini belum diterima. Mudah-mudahan tahun depan diusulkan dan bisa masuk," terangnya.

"Ini juga menjadi indikator mendapatkan Kota Layak Anak," tambahnya.

Pelatihan fasilitator sekolah ramah anak ini menghadirkan Muhammad Soleh, sebagai perencana ahli madya kementerian PPPA dan Dr Baharuddin sebagai fasilitator nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak. (yah)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Sejumlah personel Satpol PP Kukar yang membongkar papan yang terpasang di atas drainase, yang menjadi lokasi PKL berjualan.

Tertibkan PKL, Satpol PP Bongkar Papan Penutup Drainase Depan Terminal Jonggong

TENGGARONG-Penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), di depan Terminal Jonggong, di Jalan Danau Semayang, Kelurahan Melayu, Tenggarong dilakukan oleh puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar, pada Rabu (13/9/2023) pagi.

Kasi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP Kukar, Endang Purwanto, menyebut penertiban dilakukan dengan membongkar sejumlah penutup drainase yang terbuat dari kayu. Diketahui, kayu-kayu tersebut dibuat oleh para PKL untuk dijadikan lapak dadakan. Baik itu seperti SOL sepatu, jasa pembuatan stempel, pembuatan kunci hingga penjual buah-buahan.

Selain terlihat kumuh, juga terletak di atas drainase. Sehingga menyulitkan petugas kebersihan untuk membersihkan saluran drainase, dan menyebabkan debit air tinggi.

“Di depan Terminal Jonggong itu-

kan sudah kelihatan kumuh. Mulai sekarang ada perubahan, mau kita tata dan kita bersihkan dari PKL-PKL terutama yang di atas parit itu,” ujar Endang pada mediakaltim.com.

Diakui Endang, Pemkab Kukar melalui Satpol PP sudah berulang kali mensosialisasikan hal tersebut. Bahkan sempat melakukan operasi razia pada tahun 2022, dan tidak sedikit PKL yang terjerat dan disidang. Puluhan PKL tersebut dikenakan Tindakan Pidana Ringan (Tipiring). Namun memang karena tuntutan ekonomi, PKL tetap “kucing-kucingan” kembali berjualan ditempat serupa.

PKL yang kembali kedapatan berjualan di atas drainase, diminta untuk segera membersihkan dan mengangkat barang-barang jualan mereka. Kemudian papan di atas drainase dibongkar dan dihancurkan.

“Untuk sementara di daerah depan terminal kemudian lanjut di daerah Jalan Maduningrat, karena harus

steril, selama pembangunan pasar itu tidak boleh lagi mereka jualan di sana,” lanjut Endang.

Pemkab Kukar pun sebenarnya sudah menyiapkan lokasi untuk para PKL bisa menjajakan dagangannya, baik di Pasar Mangkurawang maupun di dalam lokasi Terminal Jonggong. Namun lagi-lagi karena alasan sepi pembeli, membuat mereka memberanikan diri untuk berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

“Sebenarnya tahapannya sudah jelas, kalau sudah 2-3 kali mereka tidak mengindahkan akan ada razia seperti tahun lalu. Itu juga mengganggu proses pembangunan pasar,

suatu saat kalau pasar itu jadi kan mereka tidak boleh berjualan disana,” tutup Endang.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Pemerhati Politik dan Hukum Angkat Bicara Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sinta Rosma Yenti

PASER - Pemerhati Politik dan Hukum (Patih), Muchtar Amar, turut angkat bicara mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sinta Rosma Yenti.

Menurutnya, dugaan yang ramai jadi perbincangan di media sosial itu, cukup disayangkan jika benar terjadi. Pasalnya, Sinta Rosma Yenti merupakan istri Bupati Paser, Fahmi Fadli. Sehingga dianggap tidak elok karena memanfaatkan kedudukan yang ada.

"Tentu sangat disesalkan jika benar demikian. Harusnya, walaupun yang bersangkutan istri pejabat, tidak bisa serta merta menggunakan kekuasaan itu. Apalagi menggunakan ancaman terhadap anggaran," kata pria yang juga seorang praktisi hukum itu,

Rabu (13/9/2023).

Hingga kini diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut. Muchtar mengingatkan, agar Bawaslu serius dan tegas terhadap adanya informasi itu.

"Bawaslu harus tegas ya. Tentu saja laporan itu nantinya dapat dikembangkan kembali melalui temuan-temuan yang ditemukan dalam penelusuran maupun pemeriksaan menurut norma Perbawaslu", ucapnya.

Diketahui, Sinta Rosma Yenti, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK) Kabupaten Paser, tengah jadi sorotan karena diduga memanfaatkan kedudukannya untuk mendapat dukungan lewat pengumpulan fotokopi KTP warga.

Hal itu ramai, setelah beredar isi pe-

san dari tangkapan gambar yang beredar di media sosial. Dalam isi pesan tersebut, Kepala Desa (Kades) juga turut dijanjikan reward atau penghargaan atau imbas jasa yang telah mendukungnya untuk duduk di DPD RI.

Sinta Rosma Yenti terdaftar sebagai Bacaleg DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalim dengan nomor urut 17. Sebelumnya, Sinta sudah menanggapi isu yang beredar secara tulisan kepada media dan klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Kaltim.

Sinta berkeyakinan masyarakat Paser akan bangga ketika ada perwakilan dari daerah asalnya yang duduk di parlemen nasional. Apalagi saat ini Kabupaten Paser menjadi bagian daerah penyangga IKN.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Penyaluran beras tahap pertama dilaksanakan di Gudang BULOG Labangka Kecamatan Babulu, Rabu (13/9/2023).

9 Ribu Keluarga di PPU Terima Bantuan 296 Ton Beras

PPU - Sebanyak 9 ribu lebih keluarga berisiko stunting (KRS) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan beras. Tahun ini, ada sebanyak 296 ton beras dalam program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pusat yang digelontorkan.

Penyaluran CPP ini dalam upaya penanganan stunting di Benua Taka. Namun, pemberian kali ini juga diperuntukkan bagi warga yang terdampak kondisi cuaca ekstrem, El-Nino.

Acara launching pendistribusian CPP Pusat berlangsung di Gudang Bulog Labangka Kecamatan Babulu, Rabu (13/9/2023). Asisten III Setkab PPU Ahmad Usman menuturkan pemberian bantuan ini untuk menekan prevalensi stunting di PPU.

"Bantuan ini harus tepat sasaran. Kami akan memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Kerja sama dan

transparansi dalam proses distribusi sangat penting untuk memastikan efektivitas program ini," jelasnya.

Dalam program ini, tepatnya sebanyak 9.899 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi penerima. Tersebar di 54 desa/kelurahan di PPU.

Adapun beras yang disiapkan ialah 296.970 kilogram (296,97 ton) beras yang berasal dari Bulog. Masing-masing dari keluarga itu, menerima 10 kilogram beras tiap bulan selama 3 bulan. Dimulai pada September hingga November 2023.

"Seluruh proses penyaluran CPP akan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," tegasnya.

Untuk diketahui, stok CPP yang ada di Gudang Bulog wilayah PPU dan Paser mencapai 1.105 ton. Itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

"Dengan langkah ini, diharapkan masalah stunting dapat diminimalisir, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat," kata Usman.

Tak hanya itu, penyaluran CPP ini juga sejalan dengan upaya penanganan dampak cuaca kemarau dan fenomena El Nino yang cukup ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Ia berharap bahwa program penyaluran CPP ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat PPU, dalam membantu mengatasi permasalahan stunting yang telah lama menjadi perhatian bersama.

"Pemkab PPU berkomitmen untuk melaksanakan penyaluran CPP ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



APBD-P 2023, DPRD Kaltim Sampaikan Empat Catatan kepada Pemprov Kaltim

SAMARINDA - DPRD Kaltim memberikan sejumlah catatan untuk pemanfaatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan naiknya APBD Kaltim APBD tahun 2023 yang semula Rp17,20 triliun menjadi Rp25,32 triliun, diharapkan berbanding lurus dengan pembenahan di sejumlah bidang.

Hal demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji usai memimpin Rapat Paripurna ke-33 DPRD Kaltim, Rabu (13/9/2023).

Ia mengatakan setelah mendapat jawaban Gubernur Kaltim terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait Nota Penjelasan Keuangan APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2023, ada empat hal yang mesti menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltim.

"Ada empat hal yang penting dari jawaban Gubernur, yakni di pertanian, dan di pendidikan. Di mana 20 persen anggaran pendidikan ada Rp 4,3 triliun tapi kenyataannya kondisi fisik sekolah di Kaltim buruk. Kita minta pemprov melalui Disdik memberikan perhatian khusus SMA/SMK Negeri di Kaltim," ungkapnya.

Selanjutnya ia menyebut pada bidang infrastruktur khususnya jalan di Kaltim yang dinilai dalam keadaan yang butuh perbaikan. "Terutama

jalan dari Kubar ke Mahulu, jalan dari Tenggarong ke Tabang, mohon segera di fasilitasi," jelasnya.

Tak luput, sebut Politisi Gerindra ini, yakni terkait kelistrikan di Kaltim. Ia mengungkap ada 211 desa di Bumi Etam yang belum teraliri listrik. Hal ini katanya, harus menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim, mengingat postur APBD Kaltim yang kian "gemuk".

"Masalah listrik, DPRD meminta 211 desa itu dapat dialiri listrik. Dan kita sudah rapat dengan ESDM untuk memberikan anggaran lebih di murni 2024 agar semua desa teraliri listrik," pungkasnya.

Sebagai informasi APBD tahun 2023 semula Rp17,20 triliun menjadi Rp25,32 triliun. Anggaran pendapatan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding target yang telah ditetapkan pada APBD murni yang

Direncanakan semula Rp 14,62 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,07 triliun, sehingga perubahan APBD menjadi Rp18,69 triliun atau naik 27,88 persen.

Beberapa komponen pendapatan daerah yang mengalami perubahan adalah pada bagian PAD yang semula sebesar Rp8,04 triliun bertambah Rp999 miliar atau naik 12,43 persen, sehingga perubahan APBD menjadi Rp9,04 triliun.

Perubahan terjadi pada komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun estimasi dari masing-masing target PAD adalah pada bagian pajak daerah terdapat penambahan sebesar R 729,50 miliar atau naik 10,41 persen dari rencana alokasi APBD muni sebesar Rp 7,01 triliun, sehingga perubahan menjadi Rp7,74 triliun.

Pada bagian retribusi daerah, terjadi penurunan R2,21 miliar atau turun 11,03 persen dari rencana semula Rp20,05 miliar, sehingga perubahan menjadi Rp17,84 miliar.

Sementara untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran semula R232,74 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp16,99 miliar atau naik 7,30 persen, sehingga perubahan menjadi Rp249,73 miliar.

Pada lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar R782,70 miliar atau naik 32,63 persen dari rencana anggaran murni sebesar Rp255,42 miliar, sehingga perubahan menjadi Rp 1,03 triliun.

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



PELATIHAN & TATALAKSANA GIZI BURUK,
STRATEGI DINKES
TEKAN STUNTING

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIMKepala
Dinkes
Kaltim
Dr.dr.H.Jaya
Muallimin,
Sp.KJ,M.
Kes,MARS

FOKUS UTAMA TANGANI STUNTING

SAMARINDA – Momen Pelatihan dan Tata Laksana Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Timur 2023 Angkatan II yang digelar 4 hingga 9 September 2023, menjadi momen penting bagaimana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyeriusi penanganan Stunting di Bumi Etam

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kaltim Dr.dr.H.Jaya Muallimin, Sp.KJ,M.Kes,MARS, menjelaskan, sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target indikator pembangunan kesehatan adalah menurunkan stunting menjadi 14% dan menjadi 7% pada tahun 2024.

Secara luas ia menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita (triple burden) yaitu stunting dan wasting, overweight, serta defisiensi zat gizi mikro (Global Nutrition Report, 2018).

“Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 terdapat 10,2% balita wasting atau kasus gizi kurang,

3,5% diantaranya severe wasting atau gizi buruk,” sebutnya.

Ditambahkan, tingkat kematian dan kesakitan anak dengan gizi buruk lebih tinggi dibanding anak dengan gizi baik. Menurutnya, perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang.

“Kasus gizi buruk masih banyak ditemui di masyarakat, namun kasus yang dilaporkan dan yang mendapat perawatan masih rendah,” katanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan antara lain karena, terbatasnya akses layanan kesehatan, belum banyak fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan balita sakit secara integratif sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi.

Kemudian, ketidakmampuan pemberi layanan dalam tata laksana gizi buruk, dan Pelaporan yang tidak lengkap.

“Terakhir, dikarenakan rendahnya kesadaran keluarga untuk membawa balita gizi buruk ke tempat pelayanan kesehatan,” jelasnya

Untuk itu Dinkes tak tinggal diam. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

“Serta adanya program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita atau end user yang mengacu pada pedoman sejak tahun 2019,” paparnya. **(rls/adv)**

Editor : Adhi Abdhian

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM

Peserta Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim. (dok. Dinkes kaltim)

Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk, Strategi Tekan Stunting

SAMARINDA—Target menurunkan angka stunting di Kaltim, menjadi benang merah pelaksanaan Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim di Ibis Hotel, Senin (11/9/2023).

Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita (end user) mengacu pada pedoman sejak Tahun 2019.

Kepala Dinkes Kaltim Dr.dr.H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS, pada momen itu menekankan, pada 2020 dan 2021, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan revisi pada pedoman dan buku bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Modul Gizi Buruk Untuk dapat memberikan tatalaksana balita sakit secara komprehensif sesuai pedoman tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas bagi fasilitator dan tenaga kesehatan pelayanan kesehatan sebagai tim layanan kesehatan

pada anak di Puskesmas agar sesuai standar.

“Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita kurang gizi (underweight) dari 16,6% menjadi 14,7%, penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 11,6% menjadi 7,5%, penurunan prevalensi balita gemuk (overweight) dari 12,6% menjadi 9,4% namun terjadi peningkatan prevalensi balita pendek dari 27,6% menjadi 29,4%, paparnya

Sedangkan pada Riskesdas 2018 ia menunjukkan capaian kinerja gizi yang masih kurang optimal seperti proporsi BBLR pada anak 0 - 59 bulan sebesar 7,1%, proporsi resiko KEK pada ibu hamil sebesar 11,5%, persentase IMD pada bayi dan anak usia 0-23 bulan sebesar 66,1% persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 55,2% dan persentase balita mendapat vitamin A mencapai 55,7%.

“Hasil Survei Status Gizi Balita tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan prevalensi stunting mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,1% dari tahun 2021 sebesar 26,4%. Prevalensi gizi kurang (wasting) dari 7,1% menjadi 7,7%. Prevalensi underweight dari

17,0% menjadi 17,1%. Adanya peningkatan masalah gizi untuk 3 indikator,” sebutnya.

Menurutnya, Balita gizi buruk masih ditemukan di beberapa tempat baik dalam bentuk kwashiorkor, marasmus atau marasmus kwashiorkor, hal ini merupakan masalah kita bersama yang dicegah dan tanggulanginya bersama pula. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan secara profesional sesuai kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Pelatihan Pencegahan Dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita agar tenaga kesehatan mampu melakukan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita.

“Kami menyambut baik diadakannya kegiatan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit yang nantinya diharapkan setelah kegiatan ini peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini,” harapnya. (rls/rsi)

Editor Adhi Abdhian

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Irsan Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi

MANFAATKAN PROGRAM IMUNISASI ANAK

SAMARINDA - Ajakan agar orang tua lebih memperhatikan serta menjaga kesehatan anak disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim). Imunisasi, salah satu cara agar kesehatan anak dapat terjaga.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi mengatakan imunisasi dapat dilakukan semasa anak masih bayi hingga sudah Sekolah Dasar (SD).

Hal ini dinilai sangat penting, sebab jika anak tak mendapat imunisasi maka daya tahan tubuhnya akan lemah. Sehingga akibatnya anak akan lebih mudah sakit.

"Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan imunisasi ini untuk menjaga kesehatan anak-anak mereka," ucap Dr Ivan saat dikonfirmasi Kamis (7/9/2023).

Kata Dr Ivan, saat ini masih saja ada orang tua yang belum melakukan imunisa-

si terhadap anak mereka dengan berbagai alasan. Padahal, imunisasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin.

"Ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Saat ini tingkat cakupan imunisasi di Kaltim sudah cukup bagus. Kami juga telah memperkenalkan imunisasi-imunisasi baru seperti rotavirus, PCV dan HPV," ungkapnya.

Diharapkan para orang tua dapat melakukan Imunisasi kepada anak mereka, karena imunisasi merupakan langkah pencegahan yang paling efektif.

"Imunisasi ini merupakan program pemerintah, sayang kalau tidak dimanfaatkan masyarakat," pungkasnya. **(adv/vic)**



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIM

H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.K.J, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM



Dr. Jaya Muallimin saat memimpin rapat Rancangan Pergub Penanggulangan TBC.

RANCANGAN PERGUB UNTUK TEKAN ANGKA PENDERITA TBC

SAMARINDA - Guna menanggulangi penyakit Tuberkulosis (TBC), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) menggelar rapat membahas rancangan peraturan Gubernur (Pergub) terkait penanggulangan TBC. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (7/9/2023).

Rapat ini digelar sebab TBC masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kaltim.

Kepala Dinkes Kaltim, Dr. Jaya Muallimin mengatakan bahwa berdasarkan laporan Global TB tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah kasus TBC tertinggi, setelah India. Pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap eliminasi TBC melalui "Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC tahun 2030" dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 mengenai Penanggulangan Tuberkulosis.

Kata Dr. Jaya, Rancangan Pergub

yang saat ini tengah disusun pihaknya ini bertujuan untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim sesuai dengan target nasional yakni pada tahun 2030.

"Kita harapkan dengan disusunnya pergub penanggulangan tuberkulosis ini agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga kasus Tuberkulosis bisa ditangani dan teratasi bahkan lebih cepat dari target nasional yaitu pada tahun 2030," ucap dr. Jaya saat diwawancara usai rapat.

Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5.010 kasus TBC di Kaltim. Akan tetapi, data per Oktober 2022 menunjukkan bahwa kasus TBC di Kaltim masih rendah, yaitu hanya mencapai 74% dari tahun sebelumnya.

Upaya mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim pada tahun 2030 merujuk pada beberapa indikator diantaranya penurunan angka kejadian (incident rate) TBC menjadi 65/100.000 penduduk dan penurunan angka

kematian akibat TBC menjadi 6/100.000 penduduk.

"Pada tahun 2022, tercatat 42 kasus TBC RO, yang kemudian meningkat menjadi 62 kasus. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC pada tahun 2022 masih rendah, yaitu sebesar 44 persen," ungkapnya.

Untuk menekan angka penderita TBC di Kaltim, Directly Observed Treatment Strategy (DOTS) menjadi strategi dalam penanggulangan Tuberkulosis yang terdiri dari 5 strategi. Yaitu komitmen dalam mendukung pengobatan TBC sampai tuntas, pendiagnosaan TBC melalui pemeriksaan bakteriologis, pendampingan Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk menjamin kesembuhan, dan penyediaan obat TBC yang terjamin baik kualitas maupun kuantitas, serta pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang baik.

"Dengan rancangan Pergub ini diharapkan dapat menekan angka penderita TBC di Kaltim," pungkasnya. **(adv/vic)**

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallim, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Ilustrasi pengidap TBC.

WASPADA, JANGAN REMEHKAN VIRUS TBC

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim), Dr Jaya ajak warga agar selalu waspada terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis (TBC).

Hal ini dikatakannya perlu diwaspadai, sebab TBC mampu menyerang organ paru-paru. Bahkan tak jarang pengidap TBC hingga meninggal dunia.

"Tidak cuma itu, terkadang juga hingga menyerang organ lainnya," ucap Dr Jaya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Ia meminta kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Jika menemukan gejala TBC harus segera ditangani. Sebab jika dibiarkan TBC dapat menular.

"Akibatnya biasanya pengidap batuk-ba-

tuk, karena organ pertama yang diserang paru-paru. Batuknya biasanya kering atau berdahak. Ini harus didiagnosa biasanya dalam kurun waktu dua minggu," ungkapnya.

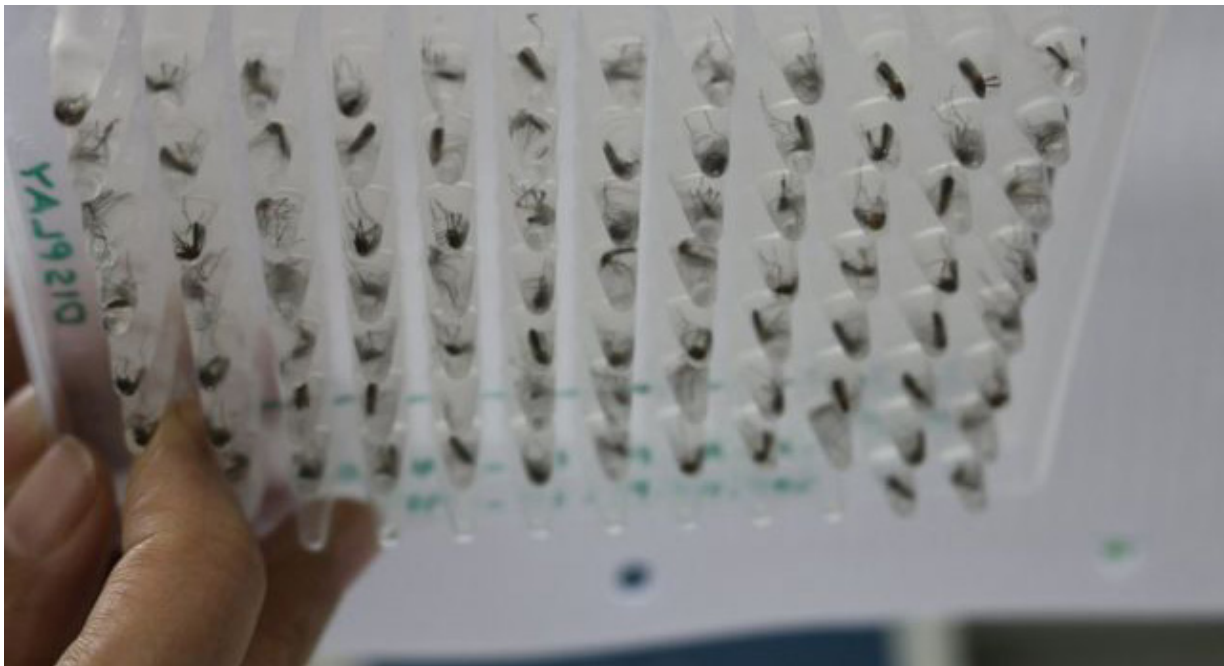
Orang yang mengidap TBC dan tidak diperiksa bisa jadi penyebab awal penularan kepada keluarganya.

Sebab keluarga adalah lingkungan terdekatnya dan paling banyak berkontak dengan pengidap.

"Jadi jika menemukan gejala TBC terhadap keluarga harus segera diperiksa. Jika dalam dua minggu batuk tak berhenti maka harus segera diperiksa," pungkasnya. (adv)

Pewarta : Viqih Jati Kusum

Editor : Nicha Ratnasari



Ilustrasi penyuntikan bakteri Wolbachia.

TEKNOLOGI BAKTERI WOLBACHIA, SOLUSI TEKAN ANGKA KASUS DBD

SAMARINDA - Dalam upaya menekan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Bontang akan menjadi pilot program Teknologi Wolbachia. Kota Bontang dipilih lantaran memiliki jumlah kasus DBD tertinggi di Kaltim.

Teknologi Wolbachia sendiri merupakan bakteri alami, simbiosis yang umum ditemukan di hewan arthropoda, dengan mekanisme menghambat replikasi virus dengue yang diperankan oleh Wolbachia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Dr Jaya Muallimin mengatakan, pilot program Wolbachia ini direncanakan akan diadakan di Kota Bontang pada bulan September 2023 mendatang.

"Ini arahan langsung dari Kemenkes. Penerapan pilot program pertama nanti akan dilakukan di Kota Bontang pada September nanti," ucap Dr Jaya saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu.

Dr Jaya mengungkapkan, pilot program ini merupakan pertama kali dilakukan. Tujuannya sendiri guna meminimalisir penyebaran kasus DBD. Katanya hal ini mampu menekan angka kasus DBD di Kaltim hingga 77 persen.

"Hasil penelitian tersebut mampu menurunkan 77 persen incidence rate (IR) Dengue dan mengurangi masuk RS sebesar 86 persen," jelas Dr Jaya.

Sementara itu, untuk kinerja Wolbachia sendiri, Dr

Jaya menyebutkan nyamuk ber-Wolbachia yang dilepas ini nantinya akan kawin silang dengan nyamuk *Aedes Aegypti* pembawa DBD.

"Setelah kawin silang ini, akan menghasilkan keturunan nyamuk ber-Wolbachia," ungkapnya. "Wolbachia sendiri sudah terbukti ampuh dan telah digunakan di berbagai negara maju untuk menekan angka DBD," lanjutnya.

Untuk mensukseskan pilot program Wolbachia ini, kata Dr Jaya juga diperlukan komitmen kepala daerah dengan seluruh lintas sektor, dan lintas program terkait. **(adv)**

Pewarta : Viqih Jati Kusuma
Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Irsan Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM

Kepala Dinkes Kaltim, Dr Jaya Muallimin.

MINIMALISIR PENINGKATAN KASUS DBD, DINKES KALTIM AJAK MASYARAKAT BERSIHKAN LINGKUNGAN

SAMARINDA - Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) hingga bulan Agustus 2023 ini hampir sebanyak 3.000 warga Kaltim telah terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka ini bahkan hingga kini terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkes Kaltim, Dr Jaya Muallimin mengajak masyarakat agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya.

Ia menekankan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk meminimalisir lokasi nyamuk berkembang biak. Hal ini disebutkannya, bisa dengan cara mengurangi genangan yang ada di sekitar tempat tinggal, dan

membersihkan area kotor yang menjadi sarang nyamuk.

"Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) ini terus kita imbau juga ya. Karena masyarakat yang terjangkit DBD (Demam Berdarah Dengue) ini terus meningkat di Kaltim. Perlu bagi warga untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka," ucap Dr Jaya saat dikonfirmasi Kamis (24/8/2023) pagi.

Dr Jaya mengungkapkan, perihal penyebaran kasus DBD saat ini bukanlah hal yang sepele. Sebab hingga bulan Agustus 2023 ini saja terdapat 15 anak meninggal dunia akibat DBD.

"Ini tidak bisa disepelekan. Perlu bagi warga agar membersihkan lingkungannya. Nyamuk ini kan biasanya ha-

nya dapat terbang sejauh 100 meter saja dari lokasi sarang mereka. Jadi warga juga harus bisa membersihkan lingkungannya sendiri," ungkapnya.

Diketahui, hingga kini Dinkes Kaltim juga terus berupaya untuk meminimalisir penyebaran kasus DBD di Kaltim. Salah satunya yakni, Dinkes Kaltim akan mengadakan vaksinasi DBD yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kaltim.

"Meski begitu kita juga tetap meminimalisir kasus DBD ini. Kita akan adakan vaksinasi DBD. Sudah kita anggarkan senilai 9,6 miliar. Akhir tahun insyaallah sudah siap didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota," pungkasnya. **(adv/vic)**

MEDIA KALTIMTARA

KAMIS,
14 SEPTEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BE



HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI SELOR AKAN TERTIBKAN

BACA HALAMAN 2



MINTA PENYELESAIAN KANTOR BARU SESUAI TARGET

BACA HALAMAN 13



ISTIMEWA

TINJAUAN: Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, melakukan tinjauan lapangan terhadap progres pengerukan sungai Selor.

Hunian di Bantaran Sungai Selor Akan Tertibkan

TANJUNGSOLOR - Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan meninjau langsung pengerjaan Sungai Selor yang merupakan sumber air baku PDAM Danum Benuanta pada Selasa (12/9/2023) lalu.

Dia menilai, Sungai Selor harus dijaga dan dirawat karena bermanfaat untuk masyarakat Tanjung Selor, terlebih menjadi tumpuan kebutuhan utama PDAM.

“Yang paling utama adalah alur sungai dapat dimanfaatkan secara menyeluruh. Artinya, air Sungai Selor tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan untuk kepentingan orang banyak, melalui pengolahan PDAM,” ungkapnya.

Yansen mengharapkan masyarakat sekitar Sungai Selor memahami

maksud pemerintah dan ikut bersinergi menjaga kebersihan. Peralnya, ada manfaat lebih dalam menopang kebutuhan roda perekonomian.

“Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan bekerjasama untuk menertibkan hunian di sepanjang bantaran sungai. Termasuk MCK, itu harus ditertibkan. Tujuannya, agar penataan kota terlihat rapi,” jelasnya.

Pengolahan Sungai Selor kedepan akan dijadikan sebagai ekowisata kota, dengan dimeriahkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Kita ini memiliki potensi jika dikembangkan dengan baik, termasuk potensi Sungai Selor,” terangnya.

Dari pantauan di lapangan, terlihat sungai Selor sudah bersih dan rapi dari eceng gondok. Pengerjaan

dilakukan dengan Korem 092 Maharajalila telah rampung 59,94 persen.

Sementara, pengerukan sungai dikerjakan dengan DPUPR Perkim Kaltara telah mencapai 30,27 persen.

Salah satu warga Manggis III, Yunita sangat mengapresiasi kinerja pemerintah karena telah menepati janji sehingga pengerukan sungai dapat dilaksanakan tahun ini.

“Kami berharap sungai ini seperti sedia kala, airnya bisa mengalir dengan lancar, dan bisa menopang kebutuhan masyarakat. Apalagi kalau direncanakan disediakan pelaku UMKM kita sangat menyambut dengan baik,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



Dari 2.964 perpustakaan di Kaltim yang terakreditasi, unit terbanyak ada di Berau.

69 Perpustakaan di Berau Sudah Terakreditasi

TANJUNG REDEB - Keseriusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispupis) Berau menjadikan perpustakaan sebagai wadah memperluas wawasan semakin nampak. Hal itu terbukti melalui terus bertambahnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi.

Kepala Dispupis Berau, Yudha Budi Santosa menuturkan, beberapa perpustakaan di Bumi Batiwakkal sudah mengantongi akreditasi dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

"Kita patut berbangga, karena dari 2.964 perpustakaan di Kaltim, yang baru terakreditasi hanya sekitar 233 unit, sedangkan paling terbanyak ada di Berau, yakni sekisar 30 persen atau 69 perpustakaan," ungkapnya, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya, 69 perpustakaan yang telah terakreditasi itu merupakan wujud kesungguhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mening-

katkan mutu dan pelayanan.

Dijelaskan Yudha, akreditasi perpustakaan juga merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

"Dengan adanya akreditasi ini, berarti pengelolaan perpustakaan yang ada sudah sesuai standar nasional, tinggal bagaimana kami meningkatkan pelayanan seiring dengan perkembangan teknologi," tuturnya.

Dia menilai, perpustakaan tak hanya tempat membacabuku, melainkan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan hidup, berbagi pengalaman, hingga berdiskusi guna memecahkan suatu masalah.

"Maka dari itu, untuk menghadapi perubahan tersebut, perpustakaan memerlukan terobosan-terobosan baru," ujarnya.

Mengenai perpustakaan mana saja

yang telah terakreditasi A, dipaparkan Yudha ada 9 perpustakaan, yakni SDN 002 Tanjung Redeb, SDN 005 Tanjung Redeb, Perpustakaan Sanggam Kampung Maluang dan SDN 001 Gunung Tabur.

Selanjutnya ada SMPN 1 Kecamatan Segah, Perpustakaan Bidukbiduk, SMPN 2 Talisayan, SDN 004 Tanjung Redeb, SMPN 1 Tanjung Redeb dan SMAN 4 Tanjung Redeb.

Sedangkan, untuk yang memperoleh akreditasi B ada 3 unit, yaitu SDN 003 Tanjung Redeb, SMKN 3 Berau serta SMPN 6 Tanjung Redeb.

Kendati demikian, Yudha menyebut pihaknya di Dispupis Berau akan terus berupaya menambah jumlah perpustakaan terakreditasi.

"Semoga perpustakaan yang terakreditasi di Berau terus bertambah agar masyarakat kita dapat menambah wawasannya melalui literasi," tandasnya. (adv/and)



Suasana pelatihan Public Speaking yang diselenggarakan Dispusip Berau.

Dispusip Berau Gelar Pelatihan Public Speaking, Asah Kemampuan Masyarakat

TANJUNG REDEB - Guna mengasah keterampilan yang dimiliki masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau menggelar pelatihan public speaking pada Senin (11/9/2023) lalu.

Kepala Dispusip Berau, Yudha Budi Santosa yang dikonfirmasi Rabu (13/9/2023) menuturkan, kegiatan tersebut diselenggarakan pihaknya sebagai wujud informasi dan transformasi berbagai macam pelatihan.

"Tujuannya yakni meningkatkan soft skill maupun soft skill guna mendongkrak kesejahteraan pasca pandemi Covid-19, dan juga memberikan edukasi kepada peserta yang mengikuti," tuturnya.

Dijelaskannya, pelatihan public

speaking itu juga sebagai langkah memenuhi kebutuhan perpustakaan yang tidak hanya menyediakan koleksi buku saja, tetapi sebagai wadah belajar.

"Berbagai pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan diri. Kami juga memberikan pelatihan secara langsung kepada pengguna perpustakaan, dengan tujuan meningkatkan skill mereka," terangnya.

Yudha menyebut, melalui pelatihan public speaking, peserta diharapkan mampu berbicara di depan khalayak. Sehingga ilmu public speaking yang diperoleh dapat meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif.

"Hal ini sebagai bekal yang bisa digunakan untuk membangun keterlibatan

atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum," paparnya.

Sementara, salah seorang peserta pelatihan, Ratu menilai kegiatan ini bernilai positif untuk membuat percaya diri berbicara di depan publik. Selain itu juga, pemahaman soal materi bisa disampaikan dengan jelas, tenang dan tidak terburu-buru.

"Kegiatan seperti ini menurut saya sangat bagus. Jika perlu sering-sering diadakan," imbuhnya.

Ia berharap, usai mengikuti kegiatan ini, keterampilannya bisa bertambah dan menjadikan dirinya seorang Master of Ceremony (MC) ke depannya. "Harapannya seperti itu, makanya saya ikut pelatihan ini," tutupnya. (adv/and)



MS (30), saat ditampilkan dalam press release Polres Tarakan.

ADE/MKR

Butuh Modal untuk Bisnis, Pria di Tarakan Gelapkan Uang Perusahaan Senilai Rp 217 Juta

TARAKAN - Seorang pria berinisial MS (30) terpaksa mendekam di balik dinginnya jeruji besi, lantaran menggelapkan uang perusahaan buku sekisar Rp 217 juta.

Kasatreskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakhika Putra mengatakan, alasan MS menggelapkan uang tersebut untuk membangun bisnis jual beli pakaian bekas atau rombongan.

Diparkannya, kasus tersebut bermula dari laporan pada Desember tahun 2021 lalu, pelapor merupakan salah satu distributor buku yang berada di Jakarta, namun memiliki cabang di Tarakan.

Setelah dilakukan penelusuran lebih dalam oleh perusahaan tersebut, ditemui kerugian sebesar Rp 217 juta dengan memasukkan nota fiktif pembelian buku.

“Pelapor saat itu melapor ke Polres Tarakan pada Desember 2021. Adapun yang di laporkan adalah bahwa uang buku dari beberapa sekolah telah dibuat fiktif,” jelasnya dalam press release, Rabu (13/9/2023).

AKP Randhya menerangkan, sebelum mengungkap kasus tersebut, jajaran Satreskrim Polres Tarakan menunggu proses audit dari pihak perusahaan.

“Karena hal tersebut kami baru ungkap kasus ini. Sebab membutuhkan proses penyidikan audit untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami dan nilai yang yang diselewengkan,” paparnya.

Dilanjutkannya, pelaku menggelapkan uang dengan modus memesan buku dari perusahaan. Kemudian pelaku menjualnya dengan har-

ga yang tak sesuai.

“Modusnya pelaku pesan buku dari pusat dengan mengajukan nota fiktif. Buku dari perusahaan mendapat diskon 10 persen. Namun dijualnya harga biasa,” bebernya.

Dari hasil interogasi, pelaku mengaku melaksanakan perbuatan ini sejak Maret 2021 hingga Oktober 2021. Buku yang gelapkan merupakan buku mata pelajaran untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

“Ada 34 sekolah yang mengalami kerugian. Atas tindakan tersebut, MS dijerat Pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara,” tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Suasana Rapat Koordinasi Sinergitas Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan Pasca UU Cipta Kerja di Swiss-Belhotel Tarakan. ADE/MKR

PSDK Tarakan Gelar Rakor Sinergitas Penegakan Hukum untuk Tangani Masalah di Perairan

TARAKAN - Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan menggelar rapat koordinasi Sinergitas Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan Pasca UU Cipta Kerja di Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (13/9/2023).

Dalam rakor tersebut, dihadiri 50 orang yang terdiri dari aparat penegak hukum Provinsi Kaltara, Personel Stasiun PSDK Tarakan, dan Kementerian dari lembaga instansi terkait lainnya.

Koordinator Kelompok PPNS dan Kerjasama Penegakan Hukum PSDKP, Salman Mokoginta mengatakan, tujuan forum ini adalah mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara aparat penegak hukum. "Baik itu Polair, Angkatan Laut, PPNS, UPT Maupun Pemerintah Daerah khususnya yang ada di Kaltara," paparnya.

Salman menjelaskan, di Kaltara

terdapat beberapa kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang kerap terjadi seperti pengeboman dan penangkapan ikan oleh nelayan Malaysia.

"Paling banyak pengeboman ini di wilayah perbatasan, tentunya ada juga yang dari negara tetangga sering masuk untuk melakukan penangkapan di wilayah kita," katanya.

Selain itu, kegiatan budidaya yang juga dianggap mengganggu aktivitas di perairan. "Itu kadang-kadang antara nelayan dan pembudidaya tidak sinergi, jadi saling mengklaim. Sehingga kami pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah menengahi hal tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala PSDKPTarakan, Johanis J. Medea menerangkan, dengan wilayah kerja yang cukup luas, permasalahan dan kompleksitas kasus yang terjadi di bidang ke-

lautan dan perikanan cukup banyak.

"Tidak sedikit, artinya masih banyak dan sering terjadi. Oleh karena itu, dengan dibentuknya forum ini dapat membantu ataupun menselaraskan setiap program kerja Direktorat Jenderal PSDKP dalam implementasinya di lapangan," jelasnya.

Selain itu, membangun sinergitas dan kerjasama aparat penegak hukum yang berkepentingan di laut sehingga dalam pelaksanaannya tugas dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana dengan maksimal.

"Kemudian terbangun sinergitas yang baik antara semua stakeholders sehingga dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Saya rasa kegiatan ini sangat penting untuk kita semua," tutupnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

PSDKP Tarakan Tangani 11 Kasus Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

TARAKAN - Sepanjang Januari hingga September 2023, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan telah menangani delapan sanksi administrasi dan tiga kasus tindak pidana perikanan.

Kepala PSSKP Tarakan, Johanis J. Medea mengatakan, untuk tiga tindak pidana merupakan kasus pengeboman yang dilakukan oleh nelayan Malaysia. Saat ini, kasusnya akan dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan untuk masuk tahap satu. "Ini rekan-rekan di Sebatik berhasil menangkap. Rencananya Kamis ini dilimpahkan ke Kejaksaan untuk masuk ke tahap satu," ungkapnya, Rabu (13/9/2023).

Sedangkan untuk kasus sanksi administrasi, pihaknya telah menangani delapan kasus. Mulai dari pelanggaran daerah penangkapan, penangkapan jenis ikan yang dilindungi, pelanggaran alat tangkap dan lain sebagainya.

"Ada total delapan kasus peneraan sanksi administrasi dan 3 kasus tindak pidana perikanan," katanya.

Johanis menyebut, wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan cukup luas meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Stasiun PSDKP Tarakan, kata dia, memiliki beberapa unit armada untuk melakukan pengawasan di antaranya, Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 28 meter, kemudian untuk wilayah Sebatik memiliki speedboat Unit Reaksi Cepat (URC) atau RIB.

Lalu, di Tarakan memiliki RIB (Rigid Inflatable Boat), sementara untuk Banjarmasin dan Balikpapan memiliki speedboat pengawas yang mendukung operasi pengawasan. "Tahun ini juga ada dukungan dari pusat, satu unit Albakor atau kapal pengawas tipe 16 meter untuk menopang pengawasan di Kaltara," lanjutnya.

Saat disinggung apakah jumlah armada tersebut sudah ideal untuk mengawasi perairan di Kaltara, dia menjawab akan sangat sulit mengawasi dengan wilayah yang luas. Kendati demikian, Johanis menyebut PSDKP didukung oleh operasi pusat dengan menggunakan kapal penga-



ADE/MKR

Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan, Johanis J. Medea.

was. Menurutnya, perlu kerjasama seluruh pihak untuk menindak seluruh pelanggaran di perairan.

"Itulah pentingnya kerjasama stakeholders, kemarin yang penangkapan bom oleh negara tetangga itu bersama-sama Angkatan Laut (AL). Ketika kami turun di wilayah Berau itu juga bersama Polair. Jadi koordinasi sinergitas kami sangat luar biasa," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika





HUMAS DPRD BULUNGAN

Suasana rapat paripurna masa sidang III tahun 2023.

Pendapatan Pemkab Bulungan Tahun 2024, Diproyeksikan Sebesar 1,4 Triliun

TANJUNGSER - DPRD Bulungan melaksanakan rapat paripurna masa sidang III tahun 2023 dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2024.

Perlu diketahui, paripurna tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai KUA-PPAS tahun 2024. Penyusunan Raperda itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, penyusunan Raperda APBD 2024 tidak terlepas dari Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini, berfungsi sebagai dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD yang selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

"Ada beberapa pokok kebijakan rancangan APBD 2024, yang menyangkut bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan," ujarnya, Selasa (12/9/2023) kemarin.

Di bidang pendapatan terdiri atas pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian, pendapatan transfer dan lainnya. "Dalam realisasinya masih sama dengan tahun lalu. Bahwa pendapatan transfer relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan

sumber penerimaan daerah," tambah Syarwani.

Penerimaan pendapatan transfer, tergantung porsi dana bagi hasil pajak atau bukan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan pemerintah pusat ke daerah. Penerimaan bersumber dari PAD relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan transfer.

Namun, kecenderungan setiap tahun memberikan angka yang selalu meningkat. Dengan komposisi pendapatan daerah yang demikian, maka ketergantungan pemerintah daerah dengan pendapatan transfer masih sangat besar.

"Untuk itu, diperlukan kemandirian daerah dalam pembangunan, sehingga lebih bertanggung jawab kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan daerah dari segi keuangan maupun manajemen pemerintah," terangnya.

Sementara, untuk target pendapatan Pemkab Bulungan tahun 2024, direncanakan sebesar Rp 1.433.545.577.695. Rinciannya berupa, PAD Rp 171.558.055.447, pajak daerah Rp 56.108.031.200, retribusi daerah Rp 12.318.598.752. kemudian hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 12.500.000.000, lain-lain PAD sebesar Rp 90.631.425.495.

Pendapatan Transfer Antar

Daerah direncanakan sebesar Rp 1.261.987.522.248, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 1.178.240.067.500.

Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.095.624.717.500, selanjutnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 10.594.410.000. Dana Desa (DD) sebesar Rp 72.020.940.000.

Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp 83.747.454.748, sementara untuk

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.608.545.577.695, Alokasi anggaran direncanakan ke kelompok belanja. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 1.052.849.807.007, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Sementara, Ketua DPRD Bulungan, Kilat menjelaskan usai paripurna, selanjutnya akan dikaji untuk selanjutnya ada pandangan masing-masing fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2024. "Iya, setelah ini kita akan susun untuk melakukan pandangan masing-masing fraksi," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Bupati Bulungan Syarwani yakin kawasan pertanian bakal ditingkatkan dengan membuka jalan pertanian di setiap Kecamatan di Bulungan.

Bupati Syarwani: Perluas Kawasan Pertanian lewat Peningkatan Jalan Usaha Tani

TANJUNG SELOR - Perluasan kawasan pangan, untuk menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai lumbung pangan pertanian terus ditingkatkan.

Kawasan pertanian padi yang sudah eksisting di Kabupaten Bulungan, seperti di Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, pada tahun 2023 Pemkab Bulungan akan menambah program perluasan kawasan pertanian, dengan lebih dahulu membuka jalan pertanian.

"Cuma memang yang menjadi kendala pemerintah daerah saat ini pada proses hilirisasi. Aspek yang berkaitan dengan pengolahan pasca panen," ucap Syarwani kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Disamping itu, saat proses pengolahan hasil pertanian seperti padi, ada beberapa kendala yang ditemu-

kan seperti pada drayer atau mesin pengeringan untuk produk pertanian.

"Kita sangat menyadari berkaitan dengan drayer yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti di Sajau Hilir maupun di Tanjung Palas Utara, jumlahnya masih sangat terbatas dalam menampung dan mengelola ketika gabah basah itu harus dikeringkan," tuturnya.

Demikian juga dengan resminingnya, belum lagi ketika berbicara tentang packingnya. Ini harus berjalan, artinya bukan hanya konsen pemerintah berkaitan dengan masalah hulunya, tapi disisi lain hilirisasi pasca panen juga menjadi kondisi yang harus dibenahi sampai hari ini.

Pemkab Bulungan sangat menyadari, masih ada kelemahan, dan kekurangan yang harus perlu diperbaiki. Adapun, untuk sebaran wilayah ketahanan pangan di Bulungan, kata Syarwani itu tersebar diseluruh Ke-

camatan yang ada di Bulungan.

"Tapi yang sudah eksisting dan produktif hari ini ada di dua Kecamatan tadi, Tanjung Palas Timur dan Utara," imbuhnya.

Di Sajau Hilir lahan pertanian pengembangan padi yang sudah eksisting mencapai 300 hektare. "Tahun ini kita masuk dalam program perluasan jalan usaha tani. Supaya nanti akses untuk eksistenfikasi perluasan kawasan pertanian yang ada di setiap Kecamatan itu bisa terbuka lebar dan memudahkan akses petani," bebernya.

Tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan terus memperluaskan kawasan pertanian, misalnya di Sajau Hilir dimungkinkan untuk ditingkatkan menjadi 400 hektare atau lebih. Demikian juga dengan kecamatan lain di Kabupaten Bulungan. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



ISTIMEWA

AKTIVITAS NELAYAN: Nelayan Bunyu resah dengan aktivitas nelayan asal Tarakan dengan menggunakan alat tangkap jaring kurau.

Nelayan Bunyu Nilai DKP Kaltara Tidak Tegas Terapkan Aturan

TANJUNG SELOR - Polemik antara nelayan asal Tarakan dengan nelayan lokal Bunyu mengenai penggunaan alat tangkap ikan hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya, penggunaan jaring kurau yang dilakukan oleh nelayan asal Tarakan dinilai merugikan nelayan lokal serta ekosistem laut Bunyu.

Penyuluh Perikanan Laut Swadaya, Hariyono menjelaskan, persoalan batas wilayah penangkapan ikan oleh nelayan Asal Tarakan di Pulau Bunyu masih terjadi. Pemerintah, kata dia, sebenarnya telah berbuat dan mendengar duduk perkara ini serta bersama mencari jalan tengah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kaltara beberapa waktu lalu.

Bahkan, Nelayan Bunyu telah melalui prosedur dalam menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Setelah melewati tahapan ini, dapat disimpulkan letak persoalannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara yang tidak tegas menerapkan aturan.

"Jadi, tidak ada sanksi yang diberikan kepada Nelayan yang menggunakan jaring kurau. Persoalan ini, jujur kami nelayan di Pulau Bunyu bingung, kita sudah lewat RDP di DPRD Provinsi tapi masalah di lapangan tidak kunjung selesai, ini yang kita bingungkan," ujar Hariyono, Rabu (13/9/2023).

Sebenarnya, terhadap masalah ini terbilang membahayakan antara nelayan di dua wilayah, baik dari Tarakan maupun dari Bunyu. Oleh sebab itu, pemerintah didorong untuk menerapkan regulasi secara tegas berdasarkan Peraturan Menteri Ke-

lautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 18 Tahun 2021.

"Kalau ini tidak diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan ada masalah besar dikemudian hari. Karena untuk sekarang saja sudah lumayan panas masalahnya. Kami di Bunyu sudah melakukan semestinya, tapi pelanggaran demi pelanggaran tetap saja terjadi," bebrnyanya.

Sementara, DKP Kaltara yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan, tidak tegas menerapkan aturan. Bahkan, kapal yang beraktivitas melaut di pulau Bunyu jumlahnya hampir 20 kapal.

"Pernah saat kami lakukan pantauan, terdeteksi ada sekitar 33 kapal yang tengah melaut. Untuk aktivitas para nelayan ini sebenarnya tidak dilarang, hanya saja ada ketentuan soal wilayah tangkapnya," terang Hariyono.

"Artinya ada zona-zona yang ditentukan untuk mereka menangkap ikan. Dan hal inilah kemudian yang timbul masalah. Sementara Permen KP Nomor 18 tahun 2021, ada aturan soal zonasi, termasuk panjang jaring itu sudah ada ketentuan, sesuai regulasi diatas sebenarnya mereka itu beraktivitas diatas 4 mil," sambungnya.

Bahkan kedua nelayan ini, pernah negosiasi di Bunyu dan mendapat solusi diberikan batas ketentuan 2 mil. Tetapi, beber Hariyono, nelayan Tarakan melakukan pemasangan jaring kurau hingga dibibir pantai.

"Kadang-kadang pelampungnya itu kandas. Kita mau lewat saja, takut sangkut dengan jaring, karena tempatnya dangkal," imbuhnya.

Terkait polemik ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, ikut bersuara. Pasalnya, masalah tersebut pernah dilakukan negosiasi antara kedua nelayan. Akan tetapi di lapangan masih ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak dengan sanksi yang tegas.

"Kita sudah seringkali mengimbu, bahkan pernah di tangkap, kemudian kita damaikan mereka supaya tidak melakukan pelanggaran lagi, kalau mau tangkap ikan patuhi zonasinya. Kalau di Bunyu masih melanggar kita akan tindak dengan upaya hukum yang ada," tegasnya.

Kata Gubernur, Permen KP Nomor 18 tahun 2021 sudah jelas mengatur soal zonasi. Sehingga, pemerintah daerah tidak perlu lagi membuat regulasi baru untuk mengatur itu.

"Kita ikuti aturan yang sudah ada. Dan dijadikan acuanya," katanya.

Bahkan, dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga sudah diingatkan. Termasuk, melibatkan tokoh-tokoh di Pulau Bunyu, karena pernah ada kasus penangkapan terhadap nelayan yang menggunakan jaring kurau. Setelah negosiasi disepakati kata damai, tanpa adanya ganti rugi dan lain-lain.

"Tapi, syaratnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Harapan saya, nelayan asal Tarakan yang menggunakan alat tangkap kurau tidak lagi melanggar, atau melakukan penangkapan ikan di perairan Bunyu," pungkas Zainal A Paliwang. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



KUNJUNGAN LAPANGAN : Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si meninjau pembangunan Gedung Diklat yang dibangun di KBM Tanjung Selor, Selasa (12/9) lalu.

Pembangunan Gedung Diklat Kaltara Capai 40 Persen

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP., M.Si., meninjau pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (12/9).

Pada kesempatan tersebut, Wagub Yansen TP memberikan apresiasi atas progress pembangunan yang telah mencapai 45 persen. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi konstruksi yang

ramah gempa dalam pembangunan asrama ini.

“Asrama Diklat ini akan menjadi tempat pelatihan dan pendidikan bagi para ASN di Kaltara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan teknologi yang ramah gempa agar bangunan ini lebih aman dan tahan terhadap bencana,” ucap Wagub Kaltara Yansen TP.

Wagub Yansen menambahkan bahwa pembangunan Asrama Diklat Pemprov Kaltara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah provinsi Kaltara.

“Asrama Diklat Kaltara memiliki luas bangunan sekitar 432 meter persegi dengan kapasitas sekitar 200 orang. Nantinya asrama ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk ruang belajar di lantai I, ruang pertemuan, dan asrama yang terletak di lantai II. Pembangunan asrama ini didanai menggunakan dana APBD Kaltara tahun anggaran 2023,” terang Wagub Yansen. (dkisp)



Lagi, Pemprov Diganjar Penghargaan oleh BKN

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mendapatkan peringkat ke III atas apresiasi Percepatan Layanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pensiun di Wilayah Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apresiasi ini diberikan langsung Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Drs. Aris Windiyanto, M.Si pada Rakor BKN yang digelar di Balikpapan, Selasa (12/9).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa mengungkapkan

apresiasi tersebut diberikan atas komitmen Pemprov Kaltara pada manajemen kepegawaian.

"Alhamdulillah, kita mendapatkan peringkat ke 3. Ini menjadi komitmen kita dalam memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan tepat,"katanya.

Ia berharap adanya apresiasi ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan layanan kepegawaian. "Kita berharap tiap tahunnya layanan kepegawaian semakin baik. Apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi kita,"jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah mendapatkan tiga penghargaan atas kinerja instansi pengelola manajemen aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah Kerja Kantor Regional VIII.

Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, A. Darmuji kepada Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang serta disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Tanjung Selor pada Juni lalu. (dkisp)



SEGERA DIRAMPUNGKAN: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meninjau pengerjaan gedung baru Setprov Kaltara belum lama ini.

Minta Penyelesaian Kantor Baru Sesuai Target

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum meninjau kegiatan progress pembangunan gedung baru Sekretariat Provinsi (Setprov) yang berlokasi di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang meminta agar pihak kontraktor menyelesaikan pembangunan gedung baru Setprov Kaltara sesuai dengan target yang telah ditentukan.

“Kita berharap kendala lainnya dapat diatasi oleh pihak kontraktor sehingga tidak akan terjadi keter-

lambatan dalam proses penyelesaian,” tegas Zainal Paliwang di lokasi proyek, Senin (11/9/2023).

Diketahui bahwa pengerjaan Gedung Sekretariat Pemprov Kaltara saat ini merupakan pengerjaan tahap ke-9, dan dipastikan akan selesai pada tahun depan.

“Kita memiliki target untuk menyelesaikan proyek ini tahun depan. Untuk lantai 3 dan 4, prioritasnya adalah bulan Oktober nanti, terutama untuk ruangan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Provinsi Kaltara. Pekerjaan sudah mencapai 70 persen, yang tinggal dilakukan

adalah tahap finishing,” terangnya, sambil didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi mengakui terus mendorong penyedia untuk mempercepat pekerjaannya. “Ini terus berjalan, kita berharap lantai 3 dan 4 bisa segera operasional,” terangnya.

Untuk pekerjaan yang sedang berproses di lantai 4 adalah pengerjaan interior dengan target selesai di awal bulan Oktober. (dkisp)



SOSIALISASI: Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si membuka Sosialisasi SIMADU MORASA di Hotel Luminor Tanjung Selor.

Pemprov Sosialisasikan SIMADU MORASA

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Bustan SE., M.Si. membuka Sosialisasi Sistem Data Terpadu Monitoring Pengadaan Barang / Jasa (SIMADU MORASA) dan Workshop Penyusunan Dokumen Pemilihan bagi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Kegiatan workshop juga dihadiri langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Amir Hamsyah dan perwakilan seluruh perangkat daerah Kaltara.

“Kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa hari ini dan

itu harus disikapi. Dan kita semua dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan sesuai dengan target dan kebutuhan baik kebutuhan perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan.

Pengadaan barang dan jasa tentu saja akan menimbulkan potensi permasalahan apabila tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Sehingga harus disikapi oleh semua tingkat pengetahuan keterampilan.

Ia mengatakan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam segala bidang menjadi kebutuhan. Sehingga pros-

es pengadaan harus sesuai dengan target dan kebutuhan dari perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

“Salah satu tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltara yaitu memberikan pembinaan dan advokasi kepada pelaku pengadaan,” jelasnya.

Karena itu ia berharap kepada peserta untuk mampu mengikuti kegiatan sesuai dengan penugasan dari instansi masing-masing.

“Kita harapkan dapat meningkatkan profesionalisme yang diberikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” tutupnya. (dkisp)